


Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi

Teguh Trianung Djoko Susanto^{1*}, Agnes Malyka², Harun Fauzi³, Najwa Faradisa⁴, Nasywa Rifatul⁵, Tsabita Malfanda⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
E-mail: teguhtrianungdjokos@unj.ac.id

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 21 May 2025

Revised: 28 May 2025

Accepted: 04 June 2025

Kata Kunci:

Biaya Pendidikan
Tersembunyi, Daerah 3t,
Kebijakan Afirmatif,
Kemiskinan Antargenerasi

Keywords:

*Hidden Education Costs, 3t
Areas, Affirmative Policies,
Intergenerational Poverty*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana biaya tidak langsung pendidikan, seperti seragam dan transportasi, berkontribusi terhadap ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah, laporan kebijakan, dan data sekunder yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Sumber data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap konteks daerah 3T dan keterkaitannya dengan biaya pendidikan tidak langsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa 68% keluarga berpenghasilan rendah di daerah 3T mengalokasikan hingga 40% dari pendapatan bulanan mereka untuk menutupi biaya pendidikan tidak langsung. Beban ini secara signifikan memperburuk tingkat partisipasi sekolah, dengan korelasi kuat terhadap peningkatan angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur, tetapi juga oleh beban biaya tidak langsung yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan subsidi pendidikan berbasis geolokasi serta reformasi sistem pendataan penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.

This study aims to analyze how indirect costs of education, such as uniforms and transportation, contribute to inequality in access to education in disadvantaged, outermost, and remote (3T) areas in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a systematic literature review method on various scientific publications, policy reports, and secondary data published between 2019 and 2024. Data sources were selected purposively by considering the relevance to the context of 3T areas and their relationship to indirect education costs. The results of the study show that 68% of low-income families in 3T areas allocate up to 40% of their monthly income to cover indirect education costs. This burden significantly worsens school participation rates, with a strong correlation to increased dropout rates at primary and secondary education levels. This study concludes that inequality in access to education in 3T areas is not only influenced by geographical and infrastructure factors, but also by the high burden of indirect costs. Therefore, it is necessary to integrate geolocation-based education subsidy policies and reform the recipient data collection system to be more accurate and targeted.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Teguh Trianung Djoko Susanto, et al (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi, 3(4) 3197-3204. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental atau hak dasar yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap orang. Pendidikan merupakan Selain sebagai sarana untuk mengembangkan diri, pendidikan juga menjadi kunci penting dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, yang masih termasuk negara berkembang, banyak keluarga yang masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena beban biaya yang cukup besar. Walaupun pemerintah sudah berupaya menyediakan pendidikan gratis, biaya-biaya lain seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi tantangan berat bagi keluarga berpenghasilan rendah (Kemendikbudristek, 2024).

Jika dibandingkan dengan negara lain, pengeluaran Indonesia untuk pendidikan masih tergolong rendah, hanya sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (World Bank, 2024). Negara ASEAN lain seperti Vietnam (4,5% PDB) dan Malaysia (5,1% PDB) mampu mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar, mencerminkan prioritas pembangunan sumber daya manusia yang lebih kuat. Kondisi ini berpengaruh pada kualitas pendidikan yang masih belum merata, terlihat dari hasil tes internasional seperti PISA, di mana Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia (OECD, 2022). Selain itu, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah negeri dan swasta juga memperjelas bahwa akses dan kualitas pendidikan belum tersebar secara adil di seluruh Indonesia (BPS, 2023). Menurut data World Bank (2024), pengeluaran pendidikan Indonesia sekitar 3,0% dari PDB, tertinggal dibanding negara ASEAN lain seperti Vietnam (4,5% PDB) dan Malaysia (5,1% PDB). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang optimal dalam mengalokasikan sumber daya untuk sektor pendidikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan ketimpangan akses.

Situasi ini semakin sulit akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 yang membuat ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah karena biaya pendidikan yang terus meningkat (The Guardian, 2024; UNESCO, 2020). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa biaya rata-rata pendidikan di Indonesia cukup tinggi, mulai dari Rp3,24 juta per tahun untuk SD, Rp5,59 juta untuk SMP, hingga Rp7,80 juta untuk SMA. Biaya ini tentu menjadi beban besar bagi keluarga dengan penghasilan terbatas (BPS, 2023). Pemerintah memang sudah menyediakan bantuan seperti dana BOS, tapi seringkali bantuan ini belum cukup atau belum tepat sasaran untuk mengurangi beban biaya tersebut (Kemendikbud mRistik, 2024).

Ketimpangan dalam akses pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kesempatan belajar anak-anak, tetapi juga memengaruhi kualitas hasil pendidikan mereka. Hal ini berimbas pada kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja dan mengubah kondisi sosial ekonomi keluarganya di masa depan. Pendidikan yang tidak merata dan kurang inklusif akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia (World Bank, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas guru, hingga program bantuan yang benar-benar tepat sasaran agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya yang berat (Kemendikbudristek, 2024; UNESCO, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam bagaimana beban biaya pendidikan memengaruhi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada makna, pengalaman, dan kondisi sosial yang dirasakan oleh informan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kualitatif fenomenologis, karena ingin mengeksplorasi pengalaman subjektif dari individu (siswa, orang tua, dan pihak sekolah) dalam menghadapi beban biaya pendidikan dan dampaknya terhadap akses pendidikan yang setara. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah 5 tahun terakhir, laporan organisasi internasional, dan buku terbitan 5–10 tahun terakhir yang relevan dengan topik biaya pendidikan dan ketimpangan akses di negara berkembang. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Biaya Tidak Langsung

Meskipun pendidikan dasar dinyatakan gratis di banyak negara berkembang, biaya tidak langsung seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi beban bagi keluarga miskin (Bray, 2008). Hal ini menyebabkan banyak anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan dasar gratis melalui program Wajib Belajar 12 Tahun dan bantuan operasional sekolah (BOS), kenyataannya masih banyak keluarga miskin yang menghadapi hambatan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Hambatan ini tidak berasal dari biaya langsung seperti SPP, tetapi dari biaya tidak langsung seperti pembelian seragam, buku pelajaran, alat tulis, transportasi, hingga uang sumbangan sukarela yang kerap diwajibkan secara tidak resmi (Pratiwi, 2022).

Menurut penelitian oleh Kurniawan dan Salim (2020), beban biaya tidak langsung ini secara signifikan memengaruhi partisipasi siswa dari keluarga kurang mampu. Anak-anak dari rumah tangga miskin lebih berisiko untuk tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena orang tua mereka harus memilih antara membiayai kebutuhan hidup harian atau biaya pendukung sekolah. Situasi ini lebih diperparah di daerah terpencil, di mana jarak tempuh ke sekolah cukup jauh dan akses transportasi terbatas. Transportasi menjadi biaya utama, dan anak-anak seringkali harus berjalan kaki cukup jauh, sehingga kelelahan dan kehilangan motivasi untuk bersekolah (Rohmani, 2020).

Di beberapa daerah, pungutan tidak resmi seperti uang komite, sumbangan bangunan, atau kegiatan sekolah masih terjadi, meskipun sudah ada larangan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meski secara administratif pendidikan dinyatakan gratis, dalam praktiknya keluarga tetap harus menanggung sejumlah biaya tambahan. Sehingga, konsep pendidikan gratis belum sepenuhnya terealisasi, khususnya bagi kelompok rentan secara ekonomi (Nuraini & Saputra, 2022).

Situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Ketika siswa dari keluarga mampu dapat mengikuti les tambahan dan memiliki sumber belajar yang memadai, siswa dari keluarga miskin justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sekolah. Ketimpangan ini secara tidak langsung memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru gagal diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan afirmatif, seperti program subsidi transportasi, bantuan perlengkapan sekolah, serta pengawasan lebih ketat terhadap pungutan liar di sekolah. Kebijakan tersebut dapat membantu menurunkan beban biaya tidak langsung dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama di kalangan keluarga miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban biaya tidak langsung, seperti transportasi dan konsumsi, menjadi komponen signifikan dalam total biaya pendidikan. Data kualitatif diperkuat dengan analisis kuantitatif sebagai berikut.

Integrasi data BPS 2023 memperlihatkan bahwa:

- Pengeluaran pendidikan keluarga berada pada kisaran 15% dari total pengeluaran rumah tangga, lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti pangan (35%) dan kesehatan (20%).



Gambar 1. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga

Selain itu, analisis peta panas menunjukkan bahwa biaya transportasi sekolah memiliki distribusi yang tidak merata, dengan beban terbesar di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.



Gambar 2. Distribusi Regional Biaya Transportasi Sekolah

Sebagai perbandingan internasional, studi Adeniran et al. (2023) di Nigeria menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, biaya transportasi menyumbang hingga 35% dari total biaya pendidikan, memperlihatkan kesamaan pola ketimpangan biaya di negara berkembang.

Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan semakin meningkat, terutama selama pandemi COVID-19. Anak-anak dari keluarga miskin lebih mungkin mengalami gangguan dalam pendidikan mereka dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kaya (UNESCO, 2020). Hal ini memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendalam, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memperburuk kesenjangan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebelum pandemi, anak-anak dari keluarga miskin sudah menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Namun, dengan diterapkannya pembelajaran daring yang mengandalkan teknologi, ketimpangan ini semakin mencolok. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke perangkat elektronik yang memadai atau koneksi internet yang stabil, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengikuti pembelajaran (UNESCO, 2020).

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga kaya atau menengah atas memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan, seperti perangkat komputer, smartphone, dan koneksi internet yang stabil. Mereka juga lebih mudah mendapatkan dukungan belajar tambahan, seperti les daring atau akses ke materi pelajaran di luar sekolah. Penelitian oleh Fadli dan Pertiwi (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses teknologi selama pandemi sangat memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari keluarga miskin. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan berbagai program untuk mendukung pembelajaran daring, seperti pembagian perangkat dan kuota internet, distribusi yang tidak merata tetap menjadi masalah utama.

Selain masalah teknologi, ketimpangan ini juga terkait dengan aspek geografis. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), memiliki kendala besar dalam mengakses pendidikan. Tidak hanya terbatas pada masalah teknologi, tetapi juga terkait dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan guru yang terlatih dan fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi ini memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan kualitas yang setara dengan anak-anak dari wilayah perkotaan (Wahyuni & Widodo, 2020).

Ketimpangan akses pendidikan ini juga berdampak pada siklus kemiskinan yang terus berlanjut. Pendidikan yang tidak merata memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai memiliki peluang lebih kecil untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka di masa depan. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut terjebak dalam kemiskinan antargenerasi, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sulit diatasi tanpa adanya intervensi kebijakan yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk merancang kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan akses ini. Program-program yang lebih terfokus pada pembagian akses teknologi yang merata, pelatihan guru di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih adil. Selain itu, kebijakan afirmatif yang memperhatikan kebutuhan siswa dari keluarga miskin dan daerah terpencil

harus diutamakan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas (Suhartono, 2021).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan akses pendidikan memerlukan analisis longitudinal. Berdasarkan laporan UNESCO (2024), "Siswa di daerah 3T mengalami ketertinggalan rata-rata 1,3 tahun pembelajaran dibandingkan siswa di wilayah perkotaan pascapandemi," memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Model pembelajaran blended learning yang diterapkan pasca-COVID di daerah terpencil juga perlu dikaji. Hasil temuan menunjukkan bahwa efektivitasnya terbatas karena:

- Keterbatasan akses listrik dan internet.
- Kesenjangan kesiapan guru dan siswa terhadap teknologi.

Strategi Pembiayaan yang Inklusif

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pembiayaan yang lebih inklusif. Program bantuan langsung dan subsidi perlengkapan sekolah telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa dari keluarga miskin (World Bank, 2022). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mempertimbangkan semua aspek biaya yang dihadapi oleh siswa dan keluarga mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Program bantuan langsung seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin. PIP, misalnya, memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bertujuan untuk mencegah angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi (Kemendikbudristek, 2022).

Namun, efektivitas program ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pendataan penerima manfaat yang sering kali tidak tepat sasaran. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa meskipun bantuan finansial tersedia, banyak siswa dari keluarga rentan tidak menerima bantuan tersebut karena tidak terdaftar dalam sistem data sosial. Hal ini menunjukkan perlunya sistem verifikasi dan evaluasi yang lebih transparan dan akurat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai pada siswa yang membutuhkan.

Selain itu, subsidi perlengkapan sekolah, seperti seragam, alat tulis, dan transportasi, perlu dijadikan bagian dari kebijakan wajib dalam upaya menghapus biaya tidak langsung pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat berperan lebih aktif melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung siswa miskin secara lokal. Program semacam ini telah diterapkan di beberapa daerah dengan hasil yang cukup signifikan dalam menurunkan angka ketidakhadiran dan meningkatkan motivasi belajar siswa (Wahyuni, 2020).

Selanjutnya, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penghapusan biaya sekolah, tetapi juga mempertimbangkan seluruh komponen biaya pendidikan, termasuk biaya psikososial, seperti tekanan ekonomi keluarga yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak. Strategi yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, seperti kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sektor swasta, menjadi penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat (Firmansyah & Astuti, 2023).

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data, upaya pemerataan pendidikan tidak hanya akan ~menjangkau lebih banyak siswa, tetapi juga akan mendorong transformasi pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan perlu lebih konkret. Salah satu model yang diajukan adalah sistem geofencing bantuan pendidikan, yaitu:

"Alokasi dana pendidikan dilakukan otomatis berdasarkan koordinat GPS sekolah dan indeks kemiskinan wilayah. Contoh: Kabupaten Nduga, Papua."

Dengan demikian, dana dapat lebih tepat sasaran kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Selain itu, perlu ditelaah studi kasus Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Jawa Barat. BOSDA mampu menurunkan kontribusi biaya pendidikan dari orang tua sebesar 22%, sehingga layak menjadi contoh replikasi untuk daerah lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengusung prinsip pendidikan gratis melalui program-program seperti Wajib Belajar 12 Tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP), realitas di lapangan menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan—khususnya biaya tidak langsung—masih menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Biaya tidak langsung seperti seragam, alat tulis, buku pelajaran, transportasi, hingga pungutan tidak resmi yang kadang masih terjadi di beberapa sekolah, menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga miskin dan mempengaruhi keputusan mereka dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.

Ketimpangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan faktor geografis, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana akses terhadap pendidikan berkualitas dibatasi oleh minimnya infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan keterbatasan fasilitas belajar. Anak-anak di daerah-daerah ini tidak hanya menghadapi tantangan biaya, tetapi juga keterisolasian wilayah dan ketimpangan kualitas layanan pendidikan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan terjadinya siklus ketimpangan pendidikan, di mana mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi rentan menjadi semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidup melalui jalur pendidikan.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 turut memperparah situasi ini. Sistem pembelajaran daring memperbesar ketimpangan akses, karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak memiliki perangkat teknologi dan koneksi internet yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan pembelajaran antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu menjadi semakin lebar, serta berdampak pada penurunan kualitas hasil belajar dan partisipasi sekolah.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi kelompok miskin dan marjinal, terutama dalam hal penghapusan beban biaya tersembunyi serta pemerataan fasilitas pendidikan. Upaya peningkatan anggaran belum dibarengi dengan manajemen distribusi bantuan yang efektif dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis data, yang tidak hanya menghapuskan biaya langsung, tetapi juga menanggulangi biaya tidak langsung secara menyeluruh. Kebijakan afirmatif seperti subsidi seragam, alat tulis, transportasi, serta peningkatan kapasitas guru di daerah 3T harus menjadi bagian dari intervensi menyeluruh pemerintah pusat dan daerah. Pendataan penerima bantuan juga perlu diperbaiki dengan sistem verifikasi yang lebih transparan dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Pendidikan yang benar-benar inklusif tidak hanya menghapuskan biaya sekolah formal, tetapi memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi dan geografis. Pemerataan pendidikan yang sejati akan tercapai jika seluruh aspek biaya pendidikan ditangani secara komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hanya dengan cara inilah, pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif, menjembatani kesenjangan, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia sebagai negara berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Amanatulloh, S. A., Trihartatik, Y., & Kurniawan, M. (2025). Optimalisasi Investasi Pendidikan Melalui Perspektif Analisis Biaya Dan Manfaat (ABM). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 87-98.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>

- Fadhila, N., & Riani, L. P. (2024). Menelusik problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 129-139
- Fadli, A., & Pertiwi, N. (2021). *Mitigasi ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Fadli, M., & Pertiwi, N. (2021). Dampak Ketimpangan Akses Teknologi terhadap Pembelajaran Daring di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 13(2), 134–145.
- Firmansyah, H., & Astuti, D. R. (2023). Sinergi Lintas Sektor dalam Pembiayaan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 14(1), 61–74.
- Kemendikbud. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Profil Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kurniawan, A., & Salim, R. (2020). Beban Biaya Tidak Langsung dalam Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 33–42.
- Nuraini, R., & Saputra, H. (2022). Tantangan Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(1), 45–56.
- Pratiwi, D. (2022). Realisasi Pendidikan Gratis di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 4(2), 98–110.
- Rohmani, N. (2020). Analisis Beban Biaya Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Sekolah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 17(1), 55–64.
- Sari, R. P., & Nugroho, A. (2021). Evaluasi Program PIP dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 112–123.
- Suhartono, A. (2021). Pendidikan untuk Semua: Mengatasi Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9(3), 72–84.
- The Guardian. (2024, July 21). *Developing countries face worst debt crisis in history, study shows*. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/21/developing-countries-face-worst-debt-crisis-in-history-study-shows>
- Tiara Aulia Mufidha, Ratna Kholifatul, Divanny Aulia Hanif, Ahmad Arum Jalaludin, Lady Maysuri Ma'rufi, & Bahtiyar Heru Susanto. (2024). Analisis pengelolaan biaya pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 271-277. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1541>
- UNESCO. (2020). *Education and COVID-19: Challenges and opportunities*. UNESCO Global Education Monitoring Report.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, S., & Widodo, B. (2020). Ketimpangan Akses Pendidikan di Wilayah 3T dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 23–36.
- Wahyuni, T. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Siswa Kurang Mampu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 25–34.
- World Bank. (2022). *Improving Education Access for the Poor in Indonesia*. World Bank Report.
- World Bank. (2022). *The State of Global Learning Poverty: 2022 Update*. World Bank.
- Zalfa Labibah Ridwan, Diki Walhadi, Adinda Setiawati, Tessa Nathalia, & Bahtiyar Heru Susanto. (2024). ANALISIS PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN DI ERA 5.0. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 205-212. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1490>